

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2009, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, hlm, 28.
- Cohen dan Uphoff. 1977. *Rural Development Participation: Concept and Measures for Project Design, Implementation, and Evaluation*. New York: Cornel University, hlm. 35.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “*Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009), hlm. 20.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup: RDPU tanggal 28 Juli 2009*, hlm. 33; Raynaldo Sembiring, *Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit against Public Participation di Indonesia*, Bina Hukum Lingkungan 3, no.2 (2019): 187-188.
- Vivienne Harpwood, 2009, *Modern Tort Law*. Seventh Edition, Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge-Cavendish Taylor & Francis Group, hlm. 369-373.
- Erlitha, Maulidya. 2019, *Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan Konsep Anti-Slapp di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.
- Frans H.J.M. Coenen, 2009, *Public Participation And Better Environmental Decisions*, Springer Science + Business Media B.V. hlm. 2.
- George W. Pring dan Penelope Canan, 1996, *Slapps: Getting Sued For Speaking Out*, Philadelphia: Temple University Press. hlm. 8-9.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita: Jakarta.
- Haryadi, P. (2022). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Sinar Grafika.
- Hernanda Rusdiana, 2021, *Problematisa Hukum Pejuang Lingkungan Hidup dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan*

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Novum : Jurnal Hukum, Unesa Surabaya, Vol 8, No 4.

Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatau Book, Jakarta, hlm. 65.

Indawati, S. D. (2017). *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan*. Verstek, 5(2).

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2008, *Menutup Akses, Menuai Bencana*, Jakarta: ICEL.

Indrawati Nani, 2023, *Kebijakan Anti-SLAPP dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.309.

James L. Creighton, 2005, *The Public Participation Handbook: Making Better Decisions Through Citizen Involvement*, San Fransisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint, hlm. 7.

Mahrus Ali, 2020, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 125.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.68.

Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad Rusli, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 84.

Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni: Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung.

Nugroho, A. R., & Najicha, F. U. (2023). *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat*. Yustitia, 9(1), 108-121.

Palimbunga, I. P. (2017). *Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua: kajian pariwisata budaya*. Melanesia, 1(2), 15-31.

Raynaldo Sembiring, 2019, *Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit against Public Participation di Indonesia*, Bina Hukum Lingkungan Vol.3, No.2, hlm, 188.

Risalah Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Rapat Panja RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 28 Juli 2009.

Risalah RUU tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Rapat Panja tanggal 28 Juli 2009, hlm. 33.

Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta: Bandung.

Sayogie, F. (2017). *Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum*. Buletin Al-Turas, 23(1), 103-120.

Septiana, D. A. V., & Saputra, D. *Tinjauan Tentang Penerapan Dakwaan Kumulatif Subsidiar Oleh Penuntut Umum Dan Metode Pembuktiannya*. Verstek, 4(1).

Sherry R. Arnshtein, 1969, "A Ladder of Citizen Participation," Journal of the American Institute of Planner, Vol. 35, No. 4, July 1969. hlm. 216-224.

Sidauruk, G. T. (2018). *Pola Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Segmentasi Psikografis Pada Program Penanganan Kekumuhan di Kelurahan Kedung Cowek*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 43.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1.

Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). *Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan*.

Terok, M. T. (2021). *Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana*. Lex Crimen, 10(2).

The World Bank, 1996, *The World Bank Participation Sourcebook, Environmentally Sustainable Development*, Washington, D.C.

Tesis

- Aprinelita, A. (2021). Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt. G/2019/PN TLK). Kodifikasi, 3(1), 41-56.
- Ester Bawinto, 2020, Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (ANTI-SLAPP) Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat (Kajian Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Agil Aufa Afinnas, 2022, Kajian Yuridis Konsep Anti-SLAPP Bagi Upaya Pembaharuan Hukum Lingkungan di Indonesia, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- PUTRI, N. W. E. Telaah Eksistensi Dissenting Opinion Hakim Agung dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Kasasi Terdakwa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid/2017).
- Rauf, S., & Iman, A. N. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Dikecamatan Abuki Kabupaten Konawe (Studi Kasus Putusan No. 46/Pid. B/Lh/2021/Pn Unh). Lakidende Law Review, 1(2), 207-220.
- Ulum, M. C. (2018). Public Service: Tinjauan Teoritis dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik. Universitas Brawijaya Press.

Website

- ICEL, Prosiding Webinar: Penguatan Mekanisme Anti-SLAPP dalam Sistem Hukum Indonesia, <https://icel.or.id/seri-analisis/1>, diakses tanggal 27 Juni 2023.
- Thea, A. (2021). Pentingnya Mendorong Terbitnya UU Anti SLAPP. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt608ba5deflcc2/pentingnya-mendorong-terbitnya-uu-antislapp?page=all>. Diakses pada 27 Juni 2023.
- Webinar ICEL, “Penguatan Mekanisme Anti SLAPP dalam Sistem Hukum Indonesia”, 2021, dapat diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=MeQ7sUFHViw&t=4419s>.

Jurnal

- Afinnas, M. A. A., Abimanyu, A., & Nyomansyah, S. P. (2022). Analisis Implementasi Anti Slapp Dalam Perlindungan Partisipasi Publik di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jomboran, Sleman). *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 141-153.
- Anantama, A. T., Munawir, Z., & Rafiqi, R. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid. B/2013/PN. MBO). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 119-131.
- Ariyanti, D. O., Ramadhan, M., & Murdomo, J. S. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal. *Jambura Law Review*, 2(1), 30-47.
- Hairi, P. J. (2018). 'Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia). *Jurnal Negara Hukum*, 9(2). Nadya Zahra Aulia, dkk, 2021,
- Anti-Slapp: Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup, *Jurnal Legislatif*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Handayani, M. M., Achmadi, J. C., & Apsari, P. K. (2021). Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 152-192.
- Hernanda Rusdiana, 2021, Problematika Hukum Pejuang Lingkungan Hidup dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Novum : Jurnal Hukum*, Unesa Surabaya, Vol 8, No 4.
- Kholifah, A. (2021). Menakar Perlindungan HAM Dalam Revisi UU Minerba Melalui UN Guiding Principles on Business and Human Rights. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 26-50.
- Laike, R. J. (2018). Eksistensi Hak Atas Tanah Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-ilmu Sosial dan Kependidikan*, 2(1), 83-89.
- Mardiya, N. Q. A. (2018). Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup/the regulation of corporate liability in environmental criminal act. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 483-502.

- Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 343-358.
- Mustanir, A., Fitriani, S., Adri, K., Nurnawati, A. A., & Goso, G. (2020). Sinergitas Peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang: The Synergy of Village Government's Role and Community Participation in the Process of Development Planning in Sidenreng Rappang District. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 84-108.
- Nadya Zahra Aulia, dkk, 2021, Anti-Slapp: Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup, *Jurnal Legislatif*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68-80.
- Naufal Sebastian, Ali Masyhar, Implementasi Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, *Jurnal Kreasi: Volume 3, No. 1, April 2023*.
- Putra, D. S., & Ginting, R. (2018). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 6(1), 1-22.
- Raseukiy, S. A. G. (2022). Membaca Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 1-24.
- Raynaldo Sembiring, 2019, Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit against Public Participation di Indonesia, *Bina Hukum Lingkungan Vol.3, No.2*, hlm, 188.
- Suadi, I. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Ardhya, S. N. (2021). Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 668-681.

Ulpa, P., Abdillah, J., Gunawan, A. F., Marhayani, C., & Imanuddin, M. (2023). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambang Ilegal Di Dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara: study kasus Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. *Jurnal Legalitas (JLE)*, 1(2), 50-62.

Widhianta, V. D. Relevansi Konstruksi Pasal Pencemaran Nama Baik Sebagai Sarana Strategic Lawsuit Against Public Participation (Slapps) Dalam Konflik Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 3(3), 345-355.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 162 tentang Minerba

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 66 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 802/Pid.Sus/2020/PN.Byw.

Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN.Kka.

Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN.Sgl.

Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT. BBL.